

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari sekitar 17.000 pulau yang tersebar di sepanjang khatulistiwa. Terletak di Asia Tenggara, Indonesia memiliki luas total sekitar 1,9 juta kilometer persegi, dengan wilayah yang terbentang dari Samudra Hindia di barat hingga Samudra Pasifik di timur. Pulau-pulau terbesar di Indonesia termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan (Borneo), Sulawesi, dan Papua. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki garis pantai yang sangat panjang, sekitar 54.716 kilometer, menjadikannya negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada (Raharjo, 2019). Keberadaan ribuan pulau dan garis pantai yang luas ini memberikan Indonesia kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk keanekaragaman hayati yang tinggi baik di darat maupun di laut. Akan tetapi, garis pantai yang panjang ini juga memberikan ancaman bencana seperti banjir rob dan abrasi bagi wilayah pesisir (Putri & Nugroho, 2020).

Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen wilayah pesisir yang baik untuk meminimalisir terjadinya ancaman bencana ini. Wilayah pesisir Indonesia rentan terhadap berbagai bencana alam seperti tsunami, banjir rob, dan erosi pantai. sehingga, manajemen pesisir harus mencakup upaya-upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana untuk melindungi penduduk dan infrastruktur pesisir (Saputra, 2023). Manajemen pesisir merupakan serangkaian proses yang melibatkan

perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap aktivitas manusia di wilayah pesisir. Diperlukan pendekatan menyeluruh untuk menangani masalah kompleks di wilayah pesisir, seperti kerusakan lingkungan, konflik kepentingan, dan dampak perubahan iklim. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Darmadi, 2023).

Manajemen pesisir sering kali melibatkan kerja sama lintas sektoral dan lintas tingkat pemerintahan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan yang berbasis pada pengetahuan ilmiah dan partisipatif sering digunakan dalam merumuskan kebijakan dan program yang terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir. Dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pesisir yang baik, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang optimal antara kebutuhan pembangunan manusia dengan pelestarian ekosistem pesisir, sehingga wilayah pesisir dapat berfungsi secara efisien dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan (Santosa & Surya, 2019).

Salah satu ekosistem di wilayah pesisir adalah hutan mangrove, yang juga dikenal sebagai hutan bakau. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang berkembang di tepi pantai di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ekosistem ini terdiri dari berbagai jenis pohon, semak, dan vegetasi yang mampu bertahan dalam kondisi pesisir yang ekstrem, seperti air laut asin, pasang surut tinggi, dan kadar oksigen rendah. Akar pohon mangrove yang kuat dan kompleks

membentuk jaringan rumit yang mampu menahan sedimentasi dan memperkuat struktur tanah di sepanjang garis Pantai (Kusmana & Sukristijono, 2020)

Hutan mangrove memiliki urgensi yang besar dalam manajemen pesisir karena perannya yang kritis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya. Ekosistem mangrove adalah habitat bagi udang, kepiting, siput, ikan, dan berbagai hewan air lainnya yang dapat dikonsumsi atau dijual untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain perannya dalam ketahanan pangan, ekosistem mangrove juga menyediakan sumber daya seperti barang/produk, bahan sandang, kayu, dan obat-obatan. Mangrove memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan dengan melindungi pantai dari abrasi dan angin topan, membentuk sedimen dan menahan unsur hara, memurnikan air yang tercemar, mencegah intrusi air laut, dan menjadi habitat bagi satwa liar (Senoaji & Hidayat, 2023). Hutan mangrove, sebagai ekosistem lahan basah, memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menyimpan karbon biru. Ekosistem ini dapat menyerap dan menyimpan karbon biru dalam jumlah besar dan untuk waktu yang lama, baik dalam vegetasi maupun sedimennya (Jang & Awiati, 2023). Dengan memperhatikan peran krusial hutan mangrove dalam perlindungan pantai, keanekaragaman hayati, penyediaan sumber daya alam, mitigasi perubahan iklim, dan adaptasi terhadap bencana alam, manajemen pesisir yang efektif harus memasukkan pelestarian dan pengelolaan hutan mangrove sebagai prioritas utama. Upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat lokal, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta diperlukan untuk melindungi, memulihkan, dan mengelola hutan mangrove secara berkelanjutan guna menjaga

keberlanjutan lingkungan pesisir dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya.

Ekosistem mangrove di Indonesia menjadi fokus utama pemerintah karena peranannya yang sangat besar dalam mendukung kehidupan dan menjaga keseimbangan lingkungan. Mangrove tidak hanya melindungi pantai dari abrasi dan angin topan, tetapi juga menyimpan karbon dalam jumlah besar, memurnikan air yang tercemar, dan menjadi habitat bagi berbagai satwa liar (Kusmana, 2023; Wibowo & Suryadi, 2023). Berdasarkan analisis data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat perubahan signifikan dalam luas area mangrove. Luas eksisting mangrove menurut Peta Mangrove Nasional (PMN) periode 2013-2019 adalah 3.311.245 ha, sementara hasil pemutakhiran PMN pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan luas menjadi 3.364.080 ha (PPID KemLHK, 2021). Data tersebut menunjukkan terjadinya penambahan luas hutan mangrove di Indonesia sebesar 52.835 ha.

Tabel 1. 1 Luas Mangrove Eksisting Per Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021

No.	Provinsi	Luas (Ha)
1.	Banten	3.555
2.	DKI Jakarta	682
3.	Jawa Barat	9.941
4.	Jawa Tengah	15.089
5.	D. I. Yogyakarta	11
6.	Jawa Timur	27.221

Sumber : Peta Mangrove Nasional 2021

Berdasarkan tabel tersebut, luas mangrove eksisting di Provinsi Jawa Tengah berada pada urutan kedua yaitu sebesar 15.089 ha, padahal sebenarnya Provinsi Jawa Tengah memiliki luas potensi habitat mangrove sebesar 44.784 ha (PPID KemLHK, 2021). Hutan mangrove di provinsi ini memiliki peran penting dalam ekosistem pesisir, seperti melindungi pantai dari abrasi, menyediakan habitat bagi berbagai jenis fauna, dan menyerap karbon. Namun, hutan mangrove di Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerusakan akibat aktivitas manusia dan pencemaran sampah plastik yang mengancam keberlangsungan ekosistem tersebut, sehingga luasan mangrove di Provinsi Jawa Tengah mengalami degradasi (Van Bijsterveldt et al., 2021). Hal ini diperkuat oleh data dari DLHK Jateng yang menunjukkan bahwa tutupan mangrove di Jawa Tengah mengalami degradasi dari tahun 2017 hingga 2020 seluas 716,41 ha (5,66%). Hal ini tampak pada data ekosistem mangrove di tahun 2017 tercatat seluas 12.661,61 ha, sedangkan pada tahun 2020 menjadi seluas 11.945,0 ha (PPID DLHK Jateng, 2020). Pemerintah dan berbagai organisasi terus berupaya melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali mangrove untuk memulihkan kondisi ekosistem ini. Inisiatif-inisiatif ini penting untuk memastikan keberlanjutan manfaat ekologis yang diberikan oleh hutan mangrove di wilayah Jawa Tengah. Mangrove menjadi perhatian pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2019 mengenai Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi Jawa Tengah. Peraturan ini ditetapkan sebagai upaya untuk melestarikan hutan mangrove melalui pelaksanaan tugas yang optimal dari setiap

pemangku kepentingan, guna menjaga kelangsungan ekosistem mangrove secara berkelanjutan (Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2019).

Tabel 1. 2 Luas Mangrove Per Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)
1.	Kabupaten Brebes	333,29
2.	Kabupaten Tegal	207,96
3.	Kabupaten Pemalang	14,5
4.	Kota Pekalongan	90
5.	Kabupaten Batang	184,45
6.	Kabupateng Kendal	51,25
7.	Kota Semarang	111,06
8.	Kabupatek Demak	2.021,28
9.	Kabupaten Jepara	1.285,46
10	Kabupaten Pati	299,589
11.	Kabupaten Rembang	60

Sumber : Diolah peneliti dari beberapa sumber, 2024

Salah satu wilayah yang berada pada wilayah pesisir Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Meskipun luasan mangrove di Kota Semarang tidak sebesar tetangganya, yaitu Kabupaten Demak yang memiliki luas 2.021,28 hektar, namun eksisting mangrove di Kota Semarang sudah menunjukkan bahwa kota ini telah berupaya untuk menjaga dan melindungi ekosistem mangrove. Hal ini karena sebagai kota besar sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang masih memiliki ekosistem mangrove dan mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan konservasi lingkungan. Sebagai kota besar yang umumnya mengalami tekanan tinggi akibat urbanisasi, industrialisasi, dan

ekspansi infrastruktur, yang sering kali menyebabkan degradasi lingkungan. Namun, keberadaan ekosistem mangrove di Kota Semarang menunjukkan adaptasi ekologis yang luar biasa serta pentingnya peran mangrove dalam mendukung ketahanan lingkungan perkotaan.

Sebagai wilayah yang terletak di pesisir Pulau Jawa, Kota Semarang memiliki karakteristik geografis yang unik dan beragam, mulai dari dataran rendah yang sering terkena banjir rob hingga daerah perbukitan di bagian selatan. Sama seperti wilayah pesisir pada umumnya, wilayah pesisir Kota Semarang juga terdapat banyak ekosistem mangrove yang tersebar di beberapa titik seperti daerah Tambak Lorok, Mangunharjo, dan sebagian wilayah Pelabuhan Tanjung Emas. Mangrove di wilayah pesisir Semarang memainkan peran penting dalam melindungi garis pantai dari abrasi, menyediakan habitat bagi berbagai jenis fauna, dan menyerap karbon. Namun, ekosistem mangrove ini juga menghadapi degradasi akibat konversi lahan, pembangunan infrastruktur, dan polusi. Hal ini dipertegas oleh Safitri (2023) yang menyebutkan bahwa kondisi mangrove di pesisir Kota Semarang mengalami penurunan kerapatan yang cukup signifikan antara tahun 2013 dan 2022. Penurunan kerapatan ekosistem mangrove terjadi dari angka 412,889 ha menjadi 142,562 ha, sehingga dapat diartikan bahwa dalam kurun kurang lebih sembilan tahun, kondisi mangrove di Kota Semarang mengalami penurunan seluas 270,327 ha (65,5%).

Tabel 1. 3 Luas Mangrove di Kota Semarang tahun 2019 hingga 2023

Tahun	Luas (Ha)
2019	186,49
2020	163,25
2021	169,91
2022	142,562
2023	111,06

Sumber: dikelola oleh peneliti dari beberapa sumber

Tabel 1.1 menunjukkan luasan mangrove di Kota Semarang menunjukkan tren penurunan atau degradasi. Sebenarnya antara tahun 2020 hingga 2021 luasan mangrove di Kota Semarang sedikit mengalami peningkatan dari yang awalnya 163,25 ha pada tahun 2020, menjadi 169,91 ha pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan sekitar 4,08%. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya kembali menunjukkan tren penurunan hingga terjadi penurunan yang cukup drastis antara tahun 2022 hingga tahun 2023 yakni sebesar 22,09%, dari yang awalnya seluas 142,562 ha pada tahun 2022 menjadi seluas 111,06 ha.

Degradasi hutan mangrove di Kota Semarang dipicu oleh beberapa faktor utama, seperti abrasi pantai dan perubahan garis pantai akibat aktivitas gelombang laut dan arus, yang menyebabkan penyusutan area mangrove (Aulia et al., 2015). Selain itu, aktivitas manusia seperti konversi lahan untuk industri, permukiman, dan tambak turut berperan besar dalam penurunan luas mangrove, seringkali tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan (Kusuma et al., 2023). Polusi dari limbah industri dan domestik serta sedimentasi berlebihan juga berdampak negatif, memperburuk kualitas air dan tanah yang menghambat pertumbuhan mangrove

(Hutapea et al., 2023). Perubahan iklim global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut menambah tekanan pada ekosistem mangrove, mengakibatkan daerah yang biasanya hanya tergenang secara berkala menjadi tergenang permanen, kondisi yang tidak mendukung pertumbuhan mangrove (Hutapea et al., 2023). Oleh karena itu, upaya rehabilitasi dan konservasi dengan melibatkan masyarakat lokal serta penggunaan teknologi penginderaan jauh sangat penting untuk menangani masalah ini dan mencegah degradasi lebih lanjut (Kusuma et al., 2023; Aulia et al., 2015). Untuk mengatasi hal ini, upaya rehabilitasi dan penanaman kembali mangrove dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengajak partisipasi mereka dalam menjaga lingkungan (Kusmana & Sukristijono, 2020). Selain itu, Upaya lain yang dilakukan adalah melakukan edukasi tentang pentingnya mangrove dan perlindungan lingkungan kepada masyarakat pesisir menjadi bagian penting dari upaya pelestarian. Program-program ini melibatkan sekolah, komunitas lokal, dan berbagai organisasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upaya konservasi. Upaya rehabilitasi dan konservasi mangrove memerlukan biaya tinggi dan memerlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk memastikan keberlanjutannya (Sidik & Lovelock, 2020).

Mangrove Edupark Tambakrejo hadir sebagai salah satu inisiasi dalam upaya konservasi dan pelestarian mangrove di Kota Semarang. Ekosistem mangrove ini terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Selain sebagai pemisah antara Kelurahan Tanjung Mas dengan

laut, ekosistem mangrove ini juga sebagai pelindung Kelurahan Tanjung Mas dari ancaman bencana rob dan abrasi. Kelurahan Tanjung Mas memiliki permasalahan yang sama seperti wilayah pesisir lainnya yaitu bencana rob dan abrasi (BPBD Kota Semarang, 2021). Pada mulanya *Mangrove Edupark Tambakrejo* berawal dari inisiatif inisiatif warga dan nelayan yang memanfaatkan lahan kosong yang tergenang air untuk penghijauan dengan menanam mangrove yang dimulai sejak tahun 2011. Selanjutnya, warga juga bekerjasama dengan Perusahaan dan Kelompok Cinta Alam Mangrove Asri dan Rimbun (CAMAR), untuk mengelola dan mengembangkan lokasi ekosistem mangrove ini untuk dijadikan wisata edukasi.

Gambar 1. 1 Gambaran *Mangrove Edupark Tambakrejo*



Sumber : Kompas.com

Dari yang mulanya lahan kosong, saat ini luas sebaran *Mangrove Edupark Tambakrejo* mencapai 3-4 Ha dan terdiri dari 4 jenis pohon mangrove yaitu *Rizhophora Mucronata*, *Rizhophora Apiculata*, *Avicennia Alba*, dan *Avicennia Marina* (Hesti, 2023). Aksesibilitas untuk menuju Kawasan *Mangrove Edupark Marina* (Hesti, 2023). Aksesibilitas untuk menuju Kawasan *Mangrove Edupark Tambakrejo* juga dapat dikategorikan mudah, hal ini karena sudah di dukung jalan yang baik dan infrastruktur yang memadai. Jalan untuk menuju secretariat CAMAR yaitu jalan local yang sudah dibetonisasi, sedangkan untuk sampai ke *Mangrove Edupark Tambakrejo* pengunjung dapat menggunakan perahu yang sudah disediakan dan berangkat dari secretariat CAMAR. Selain itu, ketika sudah sampai di lokasi mangrove pengunjung tidak perlu basah-basahan dikarenakan sudah tersedia fasilitas berupa *jogging track* untuk pengunjung menikmati suasana sejuk di bawah pohon-pohon mangrove yang rindang. Perkembangan luas sebaran mangrove dan penyediaan infrastruktur di kawasan *Mangrove Edupark Tambakrejo* ini tentu tidak terlepas dari peran berbagai *stakeholders* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* di Kelurahan Tanjung Mas.

Tabel 1. 4 *Stakeholders* yang terlibat dalam Pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*

<i>Stakeholders</i>	
Pemerintah	• Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah • Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang • Dinas Perikanan Kota Semarang • Kelurahan Tanjung Mas
Swasta	• PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Semarang
Akademisi	• Tim Pengabdian FMIPA Unnes
Komunitas	• KPL CAMAR • Masyarakat Tambakrejo

Sumber: diolah oleh peneliti dari beberapa sumber

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* telah melibatkan berbagai aktor kepentingan yang berperan dalam menjaga serta mengembangkan ekosistem mangrove dan lingkungan sekitarnya. Para pemangku kepentingan dari pihak pemerintah meliputi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, Dinas Perikanan Kota Semarang, dan Kelurahan Tanjung Mas. Mereka memiliki peran sebagai pembuat kebijakan (*policy creator*) yang bertujuan untuk melindungi area sekitar mangrove sesuai dengan fungsi dan tujuan masing-masing instansi. *Stakeholder* swasta juga berperan yakni PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Semarang yang turut mendukung pelestarian

mangrove melalui program CSR (Hesti, 2023). *Stakeholder* dari kalangan akademisi, seperti Tim Pengabdian FMIPA UNNES, berperan dalam memberdayakan masyarakat dengan memperkenalkan metode untuk mengembangkan potensi kawasan mangrove (Amalia et al., 2022). Selain itu, pemangku kepentingan dari kalangan masyarakat, seperti KPL CAMAR, memegang peran penting dengan pengetahuan lokal yang mereka miliki (Hesti, 2023). Mereka berfungsi sebagai penggerak utama dalam melestarikan ekosistem mangrove dan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan warga Tambakrejo. Namun, masih ada beberapa *stakeholder* yang perannya belum terlihat cukup optimal dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* ini.

Fakta yang didapatkan peneliti dari penelitian terdahulu, ditemukan bahwa peran *stakeholders* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* masih terdapat beberapa permasalahan. *Pertama*, masalah yang muncul dari peran *stakeholders* pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* adalah kurangnya koordinasi antara Pemerintah dengan Kelompok masyarakat. Hal ini dibuktikan oleh penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa Mangrove Edupark saat ini dikelola oleh KPL CAMAR, akan tetapi belum terdapat legal formal yang menjelaskan terkait pihak yang berwenang penuh atas *Mangrove Edupark Tambakrejo* (Hesti, 2023).

Kedua, belum optimalnya kerja sama antara *stakeholders* dari kalangan masyarakat dengan *stakeholders* swasta dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*. Pelaksanaan pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* telah beberapa kali melakukan kerja sama dengan *stakeholders* sektor swasta melalui

pengimplementasian program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung pemenuhan infrastruktur di lokasi tersebut. Namun, peran sektor swasta masih dirasakan kurang maksimal karena kerja sama yang dilakukan bersifat kontrak dengan jangka waktu yang cukup pendek (Cahyono et al., 2022). Studi yang mengkaji indeks kepuasan masyarakat terhadap program CSR di *Mangrove Edupark Tambakrejo*, yang dilaksanakan oleh PT Pertamina Patra Niaga, menunjukkan bahwa dukungan yang signifikan dalam hal pemenuhan infrastruktur hanya sementara, keberlanjutan program sering terhambat oleh keterbatasan durasi kontrak kerja sama. Kurangnya dana untuk menunjang proses pengelolaan hutan mangrove sebagai akibat kerja sama dengan pihak swasta sebagai investor yang masih jarang dilakukan. Padahal peran swasta cukup esensial dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*. Hal ini dibuktikan oleh penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa program CSR Pertamina Integrated Terminal Semarang melalui pembinaan KPL CAMAR di Kampung Tambakrejo telah memiliki dampak positif bagi masyarakat di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Program ini dijalankan secara partisipatif dengan mengedepankan inklusivitas dari masyarakat yang terbilang rentan secara akses dan aset (Cahyono et al, 2022).

Stakeholders adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi tersebut (Winarno, 2019). Sedangkan *stakeholders* dalam pengelolaan mangrove adalah individu tau kelompok yang memiliki pengaruh, kepentingan, atau keterlibatan dalam konservasi dan pemanfaatan ekosistem

mangrove termasuk masyarakat lokal, pemerintah, LSM, akademisi, dan sektor swasta (Syarifudin et al., 2017). Dalam pengembangan *Mangrove Edupark Tambakrejo* dibutuhkan optimalisasi sumber daya manusia dan sumber daya alam melalui kerjasama dalam pengelolaannya. Setiap kelompok pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusi yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan keberlanjutan proyek ini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Ismanto et al. (2022) yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan mangrove dibutuhkan peran berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, dan swasta, dalam menjalankan program konservasi, rehabilitasi, dan pemanfaatan sumber daya mangrove secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Peran *stakeholder* dalam manajemen ekosistem diartikan sebagai partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, penerapan kebijakan, dan evaluasi keberhasilan upaya konservasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua perspektif dan kepentingan dipertimbangkan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan legitimasi pengelolaan ekosistem (Angela, 2023). Dalam konteks ini, peran pemerintah biasanya mencakup pengaturan kebijakan, regulasi, dan pengawasan untuk melindungi dan mengelola sumber daya alam. Lembaga akademik dan penelitian berkontribusi melalui penelitian ilmiah, pengembangan teknologi, dan edukasi publik tentang pentingnya konservasi ekosistem. Sektor swasta dapat terlibat melalui praktik bisnis berkelanjutan dan investasi dalam teknologi hijau. Organisasi non-pemerintah dan masyarakat lokal memainkan peran penting dalam pelaksanaan program konservasi, pemantauan lapangan, dan advokasi kebijakan lingkungan.

Menurut teori yang diusulkan oleh Nugroho (dalam Handayani dan Warsono, 2017: 3), peranan *stakeholder* dalam kegiatan pembangunan mencakup beberapa aspek yang penting. Pertama, sebagai Policy Creator, mereka terlibat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan dalam suatu program atau kegiatan. Kedua, sebagai Koordinator, *stakeholder* memiliki tugas untuk melakukan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam suatu program atau kegiatan guna memastikan sinergi dan kolaborasi yang efektif. Ketiga, sebagai Fasilitator, mereka bertanggung jawab menyediakan segala bentuk fasilitas yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam program atau kegiatan tersebut. Keempat, sebagai Implementator, *stakeholder* memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk dalam menjalankan program tersebut di tingkat lapangan. Dan kelima, sebagai Akselerator, mereka berperan dalam mempercepat dan menyalurkan upaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, peran *stakeholder* merupakan serangkaian tugas dan tanggung jawab yang saling terkait untuk mencapai tujuan pembangunan dengan maksimal.

Dalam konteks pengelolaan ekosistem, peran *stakeholders* juga dapat dijelaskan melalui Teori *Quadruple Helix*. Konsep ini menjelaskan bagaimana interaksi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil dapat menciptakan ekosistem inovasi yang lebih holistik dan inklusif. Berdasarkan teori ini, pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, penyedia regulasi, dan fasilitator. Selain itu, Pemerintah juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi melalui kebijakan publik, insentif, dan dukungan infrastruktur.

Kalangan akademisi melibatkan universitas dan institusi penelitian yang menyediakan pengetahuan ilmiah, teknologi baru, dan penelitian dasar serta terapan. Akademisi berperan sebagai sumber utama pengetahuan dan inovasi yang dapat digunakan oleh industri dan masyarakat. Dari pihak swasta terdiri dari perusahaan dan sektor bisnis yang mengembangkan dan menerapkan inovasi untuk menciptakan produk dan layanan baru. Industri berperan sebagai pelaksana utama inovasi dan motor penggerak ekonomi. Sedangkan dari pihak masyarakat sipil, termasuk LSM, komunitas, dan individu, berperan dalam memberikan umpan balik, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah sosial, serta memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas (Carayannis dan Campbell, 2009).

Dalam hal ini terlihat dengan jelas bahwa pengelolaan suatu ekosistem bergantung pada keterlibatan peran berbagai *stakeholders* untuk mewujudkan pengelolaan yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan sosial, serta meningkatkan potensi keberlanjutan dari ekosistem tersebut. Sedangkan dalam konteks pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* masih terdapat beberapa peran *stakeholders* yang masih belum optimal seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang tadi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* Kota Semarang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *stakeholders* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* di Kota Semarang?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, ditentukan tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Menganalisis bentuk peranan yang dilakukan *stakeholders* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* di Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* di Kota Semarang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi kajian yang membahas peran *stakeholders* pada sektor pariwisata, khususnya pariwisata berbasis eduwisata wisata mangrove. Kontribusi tersebut berupa

adanya tambahan referensi mengenai dinamika peranan *stakeholder* dalam pengelolaan edu wisata mangrove.

b. Kegunaan Praktis

Hasil analisis dari penelitian ini harapannya dapat bermanfaat bagi *stakeholders* yang berperan dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* dalam mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan kolaborasi dan memastikan keberlanjutan proyek ini.

Mengingat pentingnya peran *stakeholders* dalam pengembangan edu wisata, harapannya penelitian ini mampu memberikan motivasi dan referensi bagi inisiatif serupa di wilayah pesisir lainnya terutama di Kota Semarang dalam melakukan pengelolaan yang efektif melalui peranan *stakeholders*.

Melalui penelitian ini juga diharapkan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki bahan diskusi untuk membangun kerjasama terkait pengelolaan ekosistem mangrove sebagai eduwisata di Kota Semarang.

1.5 Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis terhadap suatu topik permasalahan dalam sebuah penelitian maka dibutuhkan suatu kerangka teori yang menjadi landasan dan pedoman yang digunakan dalam penelitian melalui kerangka teori. Teori adalah suatu rangkaian asumsi, konstruksi, konsep, dan definisi, serta suatu yang berhubungan untuk dapat mengkaji suatu fakta sosial melalui perumusan hubungan antar konsep yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya.

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 5 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Judul, Nama jurnal, Tahun	Tujuan	Teori	Metode Penulisan	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Destiana, Riska., et al. Analisis Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. (2020).	Mengidentifikasi dan menganalisis pemangku kepentingan yang terlibat serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan pariwisata halal Pulau Penyengat.	Peneliti menggunakan Teori Peran <i>Stakeholder</i> (Nugroho, 2014) : 1. Policy creator 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementor 5. Akselerator	Pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif.	Hasil studi mengelompokkan pemangku kepentingan dalam pengembangan destinasi pariwisata halal sebagai berikut: 1. Policy creator yang terdiri dari DPRD Kota Tanjungpinang, Walikota Tanjungpinang, Barenlitbang Kota Tanjungpinang, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang. 2. Koordinator yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang. 3. Fasilitator yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Satuan Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, Dinas Perhubungan, MUI

					Kepulauan Riau, LPPOM Kepulauan Riau, serta Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. 4. Implementor yang terdiri dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Pokdarwis Pulau Penyengat, Himpunan Pariwisata Indonesia Tanjungpinang, agen perjalanan, serta penduduk setempat Pulau Penyengat. 5. Akselerator yang terdiri dari akademisi seperti KKN Mahasiswa UGM, media massa, dan komunitas blogger di Tanjungpinang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan destinasi pariwisata halal Tanjungpinang meliputi: 1. Faktor Pendukung, seperti nilai profesionalitas dan kepentingan umum, serta komunikasi yang efektif. 2. Faktor Penghambat, seperti tingginya rasa kurang percaya antar <i>stakeholder</i> dan kurangnya
--	--	--	--	--	---

					dukungan kebijakan yang memadai.
2.	Syahputra, Hasnanda, et al. <i>Stakeholder analysis in community based mangrove management: Case of forest management unit in Region 3 of Aceh Province.</i> Jurnal Manajemen dan Hutan Tropika. (2018).	Mengidentifikasi dan memetakan seberapa besar daya, kepentingan dan kemampuan para <i>stakeholder</i> berinteraksi dalam jaringan sosial.	Peneliti menggunakan Teori Social Network Analysis (Borgatti et al., 2022) : 1. Degree centrality 2. Closeness centrality 3. Betweenness Teori Identifikasi Aktor (Reed et al., 2009) : 1. Subjects 2. Key Players 3. Context Setter 4. Crowd	Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik snowball sampling.	Hasil studi menunjukkan bahwa KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) sebagai organisasi pengelola pada tingkat tapak belum menunjukkan peran yang signifikan dalam meningkatkan kepentingan dan pengaruhnya. Selanjutnya, dilakukan penentuan posisi para pemangku kepentingan terkait, seperti komunitas Desa Pusong Kapal, komunitas Pusong Telaga Tujoh, komunitas hutan, kepala desa, dan pemimpin komunitas yang memiliki kemampuan pengelolaan dengan mendukung mekanisme serta menumbuhkan aspirasi saat merumuskan dan merancang strategi yang lebih kuat. Dari analisis jaringan, dapat diidentifikasi para pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar, pemimpin opini, akses cepat, atau berperan sebagai perantara dalam jaringan. Informasi ini berguna untuk membangun dan mempertahankan hubungan jangka panjang melalui pola interaksi. Seiring waktu, semakin lama

					hubungan ini dibangun, semakin besar kemungkinan interaksi dapat berkembang secara optimal dengan adanya hubungan timbal balik dan komitmen bersama.
3.	Na'im, Muhamad et al. Penguatan Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Desa Cemara Kabupaten Indramayu. Jurnal Planning for Urban Region and Environment. (2020).	Mengetahui bagaimana posisi <i>stakeholder</i> dan memberikan rekomendasi dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove di Desa Cemara.	Peneliti menggunakan Teori Identifikasi Aktor (Reed et al. 2009) : 1. Subjects 2. Key Players 3. Context Setter 4. Crowd	Pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif.	Hasil studi mengelompokkan para pemangku kepentingan sebagai berikut: 1. Subjects yang terdiri dari DLH, Kelompok Tambak Bandeng Intan, dan KOMPEPAR Kedung Cowet. 2. Key Players yang terdiri dari Diskanla, Perhutani, Cabang Dinas Kehutanan, dan Pemda. 3. Crowd yang terdiri dari Bappeda dan Pemerintah Kecamatan Losarang. Penguatan peran para pemangku kepentingan perlu dilakukan melalui pengawasan oleh Perhutani sebagai pelaksana utama program pengelolaan hutan mangrove, menjalin kerja sama dengan pelaksana lainnya, serta penegakan hukum. Diskanla Kabupaten Indramayu dan Pemerintah Desa Cemara perlu memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan hutan

					mangrove. CBK perlu menyediakan sumber daya untuk proses rehabilitasi mangrove. Bappeda dan DLH perlu bekerja sama dengan terlibat langsung melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, kelompok masyarakat seharusnya tidak hanya memanfaatkan mangrove, tetapi juga turut serta dalam pelestarian hutan mangrove Desa Cemara.
4.	Kalsum, Ummu et al. Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengelolaan Mangrove Luwuk Timur Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Jurnal Hutan Pulau-Pulau Kecil. (2022).	Mengidentifikasi <i>stakeholders</i> dan menguraikan hubungan antar <i>stakeholders</i> dalam kegiatan pengelolaan Hutan Mangrove Luwuk Timur.	Peneliti menggunakan Teori Identifikasi Aktor (Bryson, 2004) : 1. Subjects 2. Key Players 3. Context Setter 4. Crowd	Pendekatan penelitian ini adalah metode kualitatif melalui teknik purposive sampling.	Hasil studi mengelompokkan para pemangku kepentingan sebagai berikut: 1. Subjects terdiri dari DLH Provinsi Sulawesi Tengah. 2. Key Players terdiri dari BPDASHL Palu-Poso dan KPH Balantak. 3. Context Setters terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng. 4. Crowd terdiri dari Dinas Kehutanan Sulteng, Bappeda Sulteng, DLH Kab. Banggai, Biro SDA, Universitas Tadulako, PT Lautan Gunung Mas, camat, Desa Hunduhon, Desa Kayutanyo,

					Desa Uwedikan, Desa Bantayan, dan masyarakat. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Palu-Poso bersama dengan KPH Balantak perlu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya seperti camat, Desa Hunduhon, Desa Kayutanyo, Desa Uwedikan, Desa Bantayan, dan masyarakat. Koordinasi juga harus dilakukan dengan PT Lautan Gunung Mas untuk mengawasi pembuangan limbah guna menjaga ekosistem. Terlihat bahwa peran para pemangku kepentingan belum optimal karena belum adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengelolaan hutan mangrove.
5.	Maharani, Gusti Ayu., et al. <i>The Role of Stakeholders in The Development of Tourism Attraction at Mertasari Beach, Sanur.</i>	Mengidentifikasi <i>stakeholder</i> yang berperan dalam pengembangan DTW (Daya Tarik Wisata) Pantai Mertasari.	Peneliti menggunakan Teori Kategori <i>Stakeholder</i> (Handayani dan Warsono, 2017) : 1. <i>Stakeholders</i> utama (primer)	Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Hasil studi ini mengelompokkan pemangku kepentingan dalam pengembangan Objek Wisata Pantai Mertasari ke dalam beberapa kategori kelompok sebagai berikut: 1. <i>Stakeholders</i> utama yang terdiri dari Bendesa Adat Intaran, BUPDA Intaran, Pokdarwis Desa

	Journal of Applied Science in Tourism Destination. (2023).		2. <i>Stakeholders</i> kunci 3. <i>Stakeholders</i> pendukung (sekunder) Teori Peran <i>Stakeholder</i> (Nugroho, 2014) : 1. Policy Creator 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementor 5. Akselerator		Sanur Kauh, dan Taman Inspiring Muntig Siokan. 2. <i>Stakeholders kunci</i> yang terdiri dari Dinas Pariwisata Kota Denpasar. 3. <i>Stakeholders sekunder</i> yang terdiri dari Perbekel Desa Sanur Kauh, Politeknik Negeri Bali, dan Tribun Bali. Selanjutnya, pemetaan peran pemangku kepentingan disajikan sebagai berikut: 1. <i>Policy creators</i> terdiri dari Bendesa Adat Intaran dan Dinas Pariwisata Denpasar. 2. <i>Koordinators</i> terdiri dari Bendesa Adat Intaran dan BUPDA Intaran. 3. <i>Facilitators</i> terdiri dari Taman Inspirasi Muntig Siokan, Perbekel Desa Sanur Kauh, Dinas Pariwisata Denpasar, dan Tribun Bali. 4. <i>Implementors</i> terdiri dari Taman Inspirasi Muntig Siokan dan BUPDA Intaran. 5. <i>Accelerators</i> terdiri dari Perbekel Desa Sanur Kauh,
--	--	--	--	--	---

					Politeknik Negeri Bali, dan Pokdarwis Desa Sanur Kauh.
6.	Ni Wayan Sulistiari, Ni Made Ari Puspitawati, Ni Luh Ramaswati Peran <i>Stakeholder</i> terhadap Pengembangan Destinasi Objek Wisata Pantai Mertasari Jurnal IPTA (Industri Perjalanan Wisata). (2021).	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran <i>stakeholders</i> dalam pengembangan objek wisata Pantai Mertasari serta memetakan peran mereka agar pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata tersebut lebih optimal.	Peneliti menggunakan Teori Kategori <i>Stakeholder</i> (Handayani dan Warsono, 2017) : 1. <i>Stakeholders</i> utama (primer) 2. <i>Stakeholders</i> kunci 3. <i>Stakeholders</i> pendukung (sekunder) Teori Peran <i>Stakeholder</i> (Nugroho, 2014) : 1. Policy Creator 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementor 5. Akselerator	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan pengelompokkan <i>stakeholders</i> ke dalam beberapa kategori, yaitu: 1. <i>Stakeholders</i> utama: Bendesa Adat Intaran, BUPDA Intaran, Pokdarwis Desa Sanur Kauh, dan Taman Inspirasi Muntig Siokan. 2. <i>Stakeholders</i> kunci: Dinas Pariwisata Kota Denpasar. 3. <i>Stakeholders</i> sekunder: Perbekel Desa Sanur Kauh, Politeknik Negeri Bali, dan Tribun Bali. Selain itu, pemetaan peran <i>stakeholders</i> disajikan sebagai berikut: • Policy creator: Bendesa Adat Intaran dan Dinas Pariwisata Denpasar. • Koordinator: Bendesa Adat Intaran dan BUPDA Intaran. • Fasilitator: Taman Inspirasi Muntig Siokan, Perbekel Desa

					Sanur Kauh, Dinas Pariwisata Denpasar, dan Tribun Bali. • Implementor: Taman Inspirasi Muntig Siokan dan BUPDA Intaran. • Akselerator: Perbekel Desa Sanur Kauh, Politeknik Negeri Bali, dan Pokdarwis Desa Sanur Kauh. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya sinergi dan koordinasi antar-<i>stakeholders</i> untuk memastikan pengembangan destinasi wisata yang berkelanjutan dan optimal
7.	Desrika Talib Analisis Peran <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Destinasi Wisata Jurnal Tulisan Ilmiah Pariwisata (TULIP). (2020).	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan destinasi wisata.	Peneliti menggunakan Teori Kategori <i>Stakeholder</i> (Handayani dan Warsono, 2017) : 1. <i>Stakeholders</i> utama (primer) 2. <i>Stakeholders</i> kunci	Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (literature review) untuk menganalisis peran <i>stakeholder</i> dalam pengembangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>stakeholder</i> dalam pengembangan destinasi wisata terbagi menjadi tiga kelompok utama: 1. <i>Stakeholder</i> Utama (Primer): Termasuk masyarakat yang tinggal di lokasi destinasi wisata atau sekitarnya yang terlibat langsung dan terkena dampak

			3. <i>Stakeholders</i> pendukung (sekunder)	destinasi wisata.	dari kegiatan pengembangan wisata. 2. <i>Stakeholder Kunci</i>: Termasuk pemerintah daerah terkait, seperti Dinas Pariwisata, yang memiliki wewenang dalam penentuan kebijakan dan program pengembangan wisata. 3. <i>Stakeholder Pendukung (Sekunder)</i>: Termasuk investor atau pihak swasta, LSM, dan akademisi yang memberikan dukungan dalam bentuk penelitian, sponsor, dan pembangunan fasilitas pendukung destinasi wisata. Penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai <i>stakeholder</i> untuk mencapai pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan optimal.
8.	Riesti Triyanti dan Indah Susilowati	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran,	Peneliti menggunakan Teori Kategori <i>Stakeholder</i>	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan dalam pengelolaan Kawasan pesisir di

	Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan di Kabupateng Gunungkidul Jurnal Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. (2019).	kepentingan, dan pengaruh <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan Kawasan pesisir Gunungkidul, serta merumuskan strategi untuk pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan.	(Handayani dan Warsono, 2017) : 1. <i>Stakeholders</i> utama (primer) 2. <i>Stakeholders</i> kunci 3. <i>Stakeholders</i> pendukung (sekunder)	kualitatif dengan alat bantu kuessioner dan wawancara mendalam	Kabupaten Gunungkidul terbagi dalam tiga kelompok utama: 1. <i>Stakeholder</i> Utama (Primer): Termasuk Kelompok Usaha Bersama Nelayan, Kelompok Sadar Wisata, Nelayan, Pedagang, Pelaku Wisata, dan Masyarakat peisir lokal. 2. <i>Stakeholder</i> Kunci: Termasuk pemerintah daerah terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, 3. <i>Stakeholder</i> Pendukung (Sekunder): Termasuk HNSI Gunungkidul, Pemerintah Desa, dan Tokoh Masyarakat setempat. Hasil penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa pengelolaan kawasan pesisir Kabupaten Gunungkidul yang berkelanjutan memerlukan partisipasi aktif masyarakat pesisir. Pemerintah harus mensosialisasikan rencana program dan kegiatan pemanfaatan kawasan pesisir, melakukan analisis daya dukung lingkungan,
--	---	---	---	---	--

					menyusun AMDAL, serta menata wilayah secara proporsional sesuai peruntukannya, dengan mengintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah yang mempertimbangkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi D.I. Yogyakarta.
9.	Melo, R. H., et al. A <i>stakeholder</i> analysis of sustainable mangrove management in Kwandang, Sub-district of North, Gorontalo District. Earth and Environmental Science Journal. (2019).	Mengidentifikasi dan memetakan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan mangrove Lestari serta mendeskripsikan peran dan tugas pokok setiap <i>stakeholders</i> .	Peneliti menggunakan Teori Identifikasi Aktor (Bryson, 2004) : 1. Subjects 2. Key Players 3. Context Setter 4. Crowd Teori Peran <i>Stakeholder</i> (Nugroho, 2014) : 1. Policy Creator 2. Koordinator 3. Fasilitator 4. Implementor 5. Akselerator	Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik snowball sampling.	Hasil studi mengelompokkan pemangku kepentingan sebagai berikut: 1. Subjek: Masyarakat, Pemerintah Desa 2. Pemain Kunci: KPH IV Gorut, DLH Gorut, Bappeda Gorut, DLK Gorut, DPRD II Gorut, LSM, dan BPDASHL 3. Pengatur Konteks: Satpol Air, Koramil, Perguruan Tinggi, dan sektor swasta/pemilik modal 4. Kerumunan: -

10.	Hairunisa A. S., Amni Z. R., dan Retna H. Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan <i>Mangrove Edupark Tambakrejo</i> di Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang Jurnal Universitas Diponegoro. (2023).	Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan Hutan Mangrove Tapak di Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang.	Teori Quadruple Helix, model klasifikasi actor yang dibagi menjadi empat unsur : 1. Pemerintah 2. Akademisi 3. Swasta 4. Masyarakat Peran <i>Stakeholders</i> menurut Nugroho et al. (2014) : <i>Policy creator</i> 1. Koordinator 2. Fasilitator 3. Implementor 4. Akselerator	Studi dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Hasil studi mengelompokkan <i>stakeholders</i> sebagai berikut: 1. Pemerintah: DLHK Provinsi Jawa Tengah berperan sebagai regulator dan fasilitator. DLH Kota Semarang dan Dinas Perikanan Kota Semarang berperan sebagai fasilitator. Kelurahan Tugurejo berperan sebagai koordinator. 2. Swasta: CV Akar Energi Mandiri berperan sebagai fasilitator. 3. Akademisi: Tim Pengabdian HMIK FPIK Undip berperan sebagai fasilitator dan akselerator. 4. Masyarakat: Kelompok Prenjak dan Pokdarwis Bina Tapak Lestari berperan sebagai koordinator, fasilitator, dan implementor. Peran pemerintah dan swasta dalam pengelolaan masih terdapat masalah seperti kurangnya koordinasi dari pemerintah serta kurangnya kerja sama yang berkelanjutan dengan sektor swasta.
-----	--	--	--	---	--

Sumber : Diolah Oleh Peneliti (2024)

Penelitian pertama berbeda dengan penelitian ini, di mana penelitian tersebut berfokus pada identifikasi peran dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pariwisata halal di Pulau Penyengat. Sementara itu, penelitian ini meneliti peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan mangrove dengan menggunakan pendekatan *quadruple helix* untuk mengidentifikasi para *stakeholders*.

Penelitian kedua berbeda dengan penelitian ini, di mana penelitian tersebut mengidentifikasi dan memetakan *stakeholders* berdasarkan kekuatan, kepentingan, dan kemampuan mereka untuk berinteraksi dalam jaringan sosial, menggunakan Teori Social Network Analysis (Borgatti et al., 2022) dan Teori Identifikasi Aktor (Reed et al., 2009). Sementara, penelitian ini mengidentifikasi peran setiap pemangku kepentingan menggunakan Teori *Quadruple Helix*.

Penelitian ketiga berbeda dari penelitian ini karena fokus utamanya adalah mengidentifikasi posisi setiap pemangku kepentingan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Cemara. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada mengidentifikasi peran dan tugas utama setiap pemangku kepentingan dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*.

Penelitian keempat berbeda dari penelitian ini karena penelitian tersebut berfokus pada identifikasi pemangku kepentingan dan menguraikan hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan mangrove. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis peran setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*.

Penelitian kelima berbeda dari penelitian ini karena penelitian tersebut mengelompokkan pemangku kepentingan dalam pengembangan desa wisata di Pantai Mertasari, sementara penelitian ini mengidentifikasi peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*.

Penelitian keenam berbeda dari penelitian ini karena penelitian tersebut berfokus memetakan peran *stakeholders* dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata Pantai Mertasari, sedangkan penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis peran setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*.

Penelitian ketujuh berbeda dari penelitian ini dimana penelitian tersebut berfokus untuk mengkaji dan menganalisis peran *stakeholders* dalam pengembangan destinasi wisata secara umum di Indonesia, sedangkan penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih kecil dimana hanya berfokus pada identifikasi dan analisis peran setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*.

Penelitian kedelapan berbeda dari penelitian ini karena penelitian tersebut berfokus pada analisis peran, kepentingan, dan pengaruh *stakeholders* dalam pengelolaan Kawasan Pesisir Gunungkidul, serta merumuskan strategi untuk pengelolaan Kawasan pesisir yang berkelanjutan, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada analisis peran masing-masing pemangku kepentingan dalam pengelolaan hutan mangrove dengan menggunakan pendekatan quadruple helix untuk mengidentifikasi para *stakeholders*.

Penelitian kesembilan berbeda dari penelitian ini karena lokus penelitiannya adalah di Hutan Mangrove Lestari, Kabupaten Gorontalo, sementara penelitian ini menggunakan lokus di *Mangrove Edupark Tambakrejo*, Kota Semarang.

Penelitian kesepuluh berbeda dari penelitian ini karena penelitian tersebut berfokus pada identifikasi dan analisis *stakeholders* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* di Kelurahan Tugurejo, Kota Semarang, sementara itu, penelitian ini memiliki lokus yang berbeda, yakni di *Mangrove Edupark Tambakrejo*, Kota Semarang.

1.5.2 Administrasi Publik

Menurut pandangan umum di Indonesia, administrasi sering dianggap sebagai praktik ketatausahaan, sebuah pemahaman yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat, terutama mereka yang belum mempelajari ilmu administrasi secara mendalam (Silalahi, 2009). Pandangan ini dianggap keliru, karena secara ilmiah, administrasi mencakup proses, fungsi, dan institusi dalam setiap kegiatan kerja sama.

Chandler & Plano (dalam Pasolong, 2019) mengutip Dwight Waldo pada tahun 1968, mendefinisikan administrasi publik sebagai seni dan ilmu yang bertujuan mengatur urusan publik dan melaksanakan tugas yang ditentukan. Definisi ini menekankan bahwa administrasi publik adalah proses manajemen dan organisasi yang melibatkan manusia dan berbagai elemen lain untuk mencapai tujuan pemerintah. Selain itu, ahli lain berpendapat bahwa ilmu administrasi mencakup seluruh kegiatan ketatausahaan seperti surat-menyurat dan pengelolaan

data yang diperlukan oleh pimpinan untuk menentukan kebijakan dan mengambil keputusan terkait tugas dan fungsi organisasi (Banga, 2018).

Dari berbagai definisi tersebut, terlihat adanya penekanan pada keterlibatan personil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, administrasi publik dapat disimpulkan sebagai keseluruhan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang melibatkan berbagai aktor publik dan memanfaatkan segala kemampuan aparatur negara serta sumber daya untuk mencapai tujuan dan menjalankan tugas negara demi kepentingan masyarakat.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut Kuhn dalam T. Keban (2004 : 31) berpendapat bahwa paradigma digunakan sebagai sudut pandang, nilai, metode, prinsip dasar, dan tata cara dalam memecahkan permasalahan yang dialami oleh masyarakat pada waktu tertentu. Nicholas Henry mengungkapkan terdapat lima paradigm dalam administrasi public berdasarkan fokus kepentingan dan lokus secara institusional dipraktikkan.

Perkembangan saat ini dari paradigma administrasi publik menggambarkan adanya perubahan makna dalam hal tujuan, teori, ataupun pendekatan/metode, dan nilai-nilai yang menjadi dasar. Menurut Nicholas Henry (2004) dalam (Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono 2020) mengemukakan terdapat 6 (enam) paradigma administras negara/publik.

Paradigma pertama yakni Dikotomi Politik dan Administrasi yang muncul antara tahun 1900 hingga tahun 1926. Lokus, atau letak pemerintahan pada negara bagian, adalah tempat yang paling sering disoroti oleh paradigma ini. Sebagai

seorang administrator publik, pemerintah mempunyai dua peran: peran politik dan peran administratif. Fungsi politik sangat berkaitan dengan tugas pemerintah untuk merumuskan undang-undang atau mewujudkan kebutuhan negara, sedangkan fungsi dari administrasi sendiri berkaitan dengan menjalankan undang-undang tersebut. Politik dan administrasi dipisahkan oleh perbedaan fungsional.

Paradigma kedua yakni Prinsip-prinsip Administrasi yang muncul antara tahun 1927 hingga tahun 1937. Konsep administrasi yang paling terkenal adalah dikembangkan oleh Gullick dan Urwick atau disebut dengan akronim POSDCorB (Perencanaan, Penyusunan Staf, Pengarahan, Koordinasi, Pengorganisasian, Pelaporan, Penganggaran). Paradigma lebih mementingkan fokus daripada situs. Berbagai prinsip-prinsip administrasi negara saat ini menunjukkan bahwa konsep tersebut dapat diajarkan dalam semua konteks administrasi yang tidak terlepas dari fungsi, lingkungan, misi, atau struktur kelembagaan sementara juga menawarkan pada indikator perbaikan.

Paradigma ketiga yakni Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik, muncul antara tahun 1950 hingga 1970. Paradigma ini sangat menekankan pada sebuah lokus dalam birokrasi pemerintahan dan pada bidang kepentingan tertentu saja. Paradigma ini tentunya berusaha untuk menafsirkan ulang keterkaitan antara ilmu politik dan manajemen negara.

Paradigma keempat yakni Administrasi Negara sebagai Manajemen yang muncul antara tahun 1954 hingga tahun 1970. Paradigma ini merupakan hasil dari kritik langsung terhadap paradigma sebelumnya yang berpendapat bahwa administrasi negara tidak bisa dipandang sebagai suatu subjek sekunder dari ilmu

politik dalam mencari sebuah alternatif, yang tampaknya hal ini menjadi disiplin utama, ilmu administrasi, dan dipilih sebagai arah yang dituju.

Paradigma kelima yakni Administrasi Negara sebagai Administrasi Negara yang muncul antara tahun 1970-an. Komponen perhatian dari paradigma ini membangun hubungan antara lokus dan fokus penyelenggaraan negara. di mana teori organisasi, analisis kebijakan publik dalam praktik, administrasi, dan strategi manajemen disorot. Lokus normatif saat ini berada pada urusan publik dan birokrasi pemerintahan.

Paradigma keenam atau paradigma terakhir yakni Governance yang muncul antara tahun 1990 dan terus mengalami perkembangan hingga sekarang. Paradigma terakhir saat ini menunjukkan adanya proses pemerintahan yang modern. Dalam pembuatan kebijakan publik, yang dilakukan tidak hanya oleh pemangku kepentingan saja atau pemilik kekuasaan, akan tetapi juga melibatkan warga negara dan kelompok dari masyarakat. Terdapat hubungan antara pemegang kekuasaan dengan sektor lainnya untuk bisa ikut serta dalam proses menyediakan layanan publik. Pemerintah saat ini hanya sebagai pengatur dan pengarah dalam penyelenggaraan negara.

Paradigma governance mulai diadopsi dalam berbagai proses administrasi dan pemerintahan di negara-negara yang berbeda. Efektivitas sebuah negara dalam penyelenggaraan pemerintahan disebut sebagai good governance. Paradigma ini menghadirkan pandangan baru dalam mengatur negara, terutama dalam proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Dalam konsep governance ini, pemerintah bukanlah aktor utama, melainkan terdapat partisipasi berbagai pihak

yang terdiri dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Ketiganya memiliki tingkat dan posisi yang sama pentingnya. Perkembangan paradigma ini bertujuan menuju kepada good governance.

Oleh karena itu, penelitian ini tergolong ke dalam paradigma keenam yakni governance. Paradigma keenam membahas tiga pilar yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang menekankan pada kolaborasi dalam keseimbangan dan kesetaraan, kemudian dikembangkan menjadi pandangan baru yang disebut tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Paradigma ini mencakup pengembangan kolaborasi antar *stakeholders* secara sinergis dan konstruktif. Oleh karena itu, paradigma tersebut relevan dengan peran *stakeholders* dalam pengelolaan hutan mangrove guna melestarikan dan melindungi ekosistem kawasan pesisir yang dalam keberjalanannya memanfaatkan kolaborasi dari tiga pilar yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

1.5.4 Manajemen Publik

Manajemen publik adalah salah satu bidang dalam administrasi yang bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mengenai sistem administrasi dan manajemen di sektor publik maupun nirlaba. Laurence Lynn (1996) menggambarkan manajemen publik dalam tiga kemungkinan: sebagai seni, ilmu, dan profesi. Lynn mengemukakan bahwa manajemen publik sebagai seni merupakan aktivitas kreatif yang dilakukan oleh praktisi dan tidak dapat dipelajari dengan cara 'dihitung', sehingga memiliki fleksibilitas yang tinggi dan sangat bergantung pada situasi dan kondisi operasional.

Sebagai ilmu, manajemen publik memerlukan analisis sistematis melalui interpretasi dan eksplanasi. Sebagai profesi, ini merujuk pada sekelompok individu yang mendedikasikan diri pada bidang ini. Sheldon mendefinisikan administrasi sebagai penentuan kebijakan tingkat atas, koordinasi aspek utama bisnis, dan kontrol terhadap manajemen proper. Berdasarkan pandangan ini, administrasi mencakup wilayah pengambil kebijakan, koordinasi, dan kontrol terhadap manajemen, yang lebih luas daripada manajemen itu sendiri.

Namun, Henry Fayol berpendapat bahwa administrasi adalah bagian dari manajemen karena hanya salah satu fungsi dari manajemen. Ilmuwan lain seperti Van Riper Martin melihat administrasi dan manajemen sebagai keilmuan yang setara. Geert Bouckert (2004) dan Lynn (2005) juga menyatakan bahwa administrasi dan manajemen tidak dapat dibedakan.

Sebagian besar sarjana administrasi publik setuju bahwa manajemen publik adalah jenis keilmuan dan pembahasan dari administrasi publik. Federickson & Smith (2003) menyebutkan bahwa meskipun banyak perubahan terjadi di sektor administrasi publik, tidak ada pendekatan yang lebih kuat daripada manajemen. Manajemen ilmiah yang diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor menjadi dasar penting dalam ilmu manajemen publik.

Frederick W. Taylor memperkenalkan teori manajemen tradisional dalam karyanya "The Principles of Scientific Management" yang pertama kali dipublikasikan pada tahun 1911. Ia mengamati sektor bisnis, terutama toko, untuk mengubah kebiasaan dan tradisi yang tidak terpolakan menjadi manajemen berbasis prinsip ilmiah yang terstruktur. Prinsip Taylor melibatkan pengukuran yang tepat

dari proses kerja, seperti proses seleksi pekerja, dampak, dan pembagian kerja, yang meningkatkan produktivitas dan kerjasama antar pekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Taylor percaya bahwa penerapan prinsip tersebut akan membantu manajer dan pekerja menemukan cara terbaik untuk mencapai tujuan organisasi (Federickson & Smith, 2003). Konsep ini kemudian diadaptasi untuk sektor publik. Henry Fayol mengidentifikasi lima fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan koordinasi.

Selanjutnya, Luther Gullick, salah satu pencetus administrasi publik modern, mengembangkan fungsi manajemen yang dapat diimplementasikan dalam pemerintahan, disebut sebagai POSDCORB. Ini mencakup tujuh fungsi utama manajemen: planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), staffing (pengaturan staf), directing (pengarahan), coordinating (koordinasi), reporting (pelaporan), dan budgeting (penganggaran).

Dapat disimpulkan bahwa manajemen publik dan ilmu administrasi publik saling berkaitan dalam menciptakan mekanisme pemerintahan yang efektif dan efisien, yang juga dapat diterapkan pada sektor nirlaba. Manajemen publik akan terus berkaitan dengan administrasi publik di masa mendatang.

1.5.5 Peran

Robert Linton (dalam Musadadd, 2018:28) menguraikan teori peran sebagai gambaran interaksi sosial yang dapat dipahami melalui berbagai aktor yang berperan sesuai dengan ketentuan budaya. Teori ini menekankan bahwa individu

dengan peran tertentu harus menampilkan perilaku yang konsisten dengan hak dan kewajiban yang melekat pada peran tersebut.

Wirutomo (dalam Talib, 2016) menyatakan bahwa peran berhubungan dengan pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban serta tanggung jawab individu sesuai perannya. Thoha (2003:263) menjelaskan peran sebagai rangkaian tindakan teratur yang muncul dari posisi atau jabatan tertentu. Rafid (dalam Caahyana, 2019:392) menggambarkan peran sebagai keterlibatan aktif individu atau kelompok sesuai kemampuan mereka, dengan kesadaran bahwa mereka memiliki tanggung jawab dalam kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan bersama.

1.5.6 Stakeholder

Konsep *stakeholder* pertama kali diperkenalkan dalam ilmu administrasi seiring dengan pergeseran dari studi government ke governance. Pergeseran ini menandai transformasi dalam tata kelola pemerintahan di mana negara tidak lagi menjadi aktor utama dalam pemerintahan (LAN, 2015:34). Oleh karena itu, studi governance mencakup aktor-aktor di luar pemerintah seperti sektor swasta, LSM, dan organisasi masyarakat sipil yang disebut sebagai *stakeholder*.

Terdapat beberapa perbedaan antara konsep government dan governance. Dalam pengambilan kebijakan, studi government masih menempatkan pemerintah sebagai aktor pusat. Sebaliknya, studi governance menekankan pengambilan kebijakan melalui konsensus dari berbagai aktor, di mana pemerintah tidak lagi menjadi aktor utama (Schwab dan Kubler dalam Kharisma, 2014:9). Selain itu, hubungan antara pemerintah dengan aktor lainnya dalam government bersifat komando, sedangkan dalam governance bersifat koordinatif (LAN, 2015:29).

Banyak literatur mendiskusikan *stakeholder*, dan beberapa definisinya adalah:

1. *Stakeholder* adalah individu atau kelompok yang memiliki hubungan tertentu dan aktivitas yang berhubungan dengan peran dan fungsinya (Freedman dalam Okavia & Saharuddin, 2015:233).
2. *Stakeholder* adalah warga negara, kelompok terorganisir, atau badan publik yang berpartisipasi atau terlibat dalam pengambilan keputusan berbasis konsensus (Ansell & Gash, 2008).
3. *Stakeholder* adalah aktor-aktor yang berhubungan dalam proses penciptaan nilai, norma, dan etika yang berkembang secara efektif dan efisien dalam struktur masyarakat (Freeman, et.al., 2020:221).

Dari definisi tersebut, *stakeholder* adalah pihak yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam suatu kegiatan serta memiliki pengaruh terhadap kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Maryono (Latupapua, 2015:25-26), *stakeholder* dibagi menjadi tiga kelompok:

1. *Stakeholder* Primer: Merupakan pihak yang menerima konsekuensi langsung, baik positif maupun negatif, dari sebuah kegiatan dan memiliki kaitan langsung dengan kepentingan atau program tersebut. *Stakeholder* ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang signifikan.
2. *Stakeholder* Kunci: Pihak yang memiliki legalitas dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.
3. *Stakeholder* Sekunder: *Stakeholder* pendukung yang tidak menerima dampak langsung dari suatu kegiatan tetapi memiliki afeksi yang cukup

besar pada serangkaian kegiatan yang sedang berjalan. Mereka dapat memfasilitasi berbagai proses pembangunan dan memiliki dampak pada pengambilan kebijakan.

1.5.7 Peran *Stakeholder*

Peran *stakeholder* adalah serangkaian tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap pemangku kepentingan untuk mencapai suatu tujuan. Setiap *stakeholder* memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam menjalankan perannya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Nugroho (dalam Handayani dan Warsono, 2017: 3), peranan *stakeholder* dalam kegiatan pembangunan mencakup beberapa aspek berikut:

1. Policy Creator: *Stakeholder* yang berperan dalam setiap tahapan pengambilan keputusan dan kebijakan dalam suatu program atau kegiatan.
2. Koordinator: *Stakeholder* yang bertugas melakukan koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam suatu program atau kegiatan.
3. Fasilitator: *Stakeholder* yang menyediakan segala bentuk fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam suatu program atau kegiatan.
4. Implementator: *Stakeholder* yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan, termasuk dalam kelompok sasaran.
5. Akselerator: *Stakeholder* yang berperan dalam mempercepat dan menyalurkan upaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Dalam konteks pengelolaan ekosistem, peran *stakeholders* juga dapat dijelaskan melalui Teori *Quadruple Helix*. Konsep ini menjelaskan bagaimana

interaksi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil dapat menciptakan ekosistem inovasi yang lebih holistik dan inklusif. Berdasarkan teori ini, pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan, penyedia regulasi, dan fasilitator. Selain itu, Pemerintah juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi melalui kebijakan publik, insentif, dan dukungan infrastruktur. Kalangan akademisi melibatkan universitas dan institusi penelitian yang menyediakan pengetahuan ilmiah, teknologi baru, dan penelitian dasar serta terapan. Akademisi berperan sebagai sumber utama pengetahuan dan inovasi yang dapat digunakan oleh industri dan masyarakat. Dari pihak swasta terdiri dari perusahaan dan sektor bisnis yang mengembangkan dan menerapkan inovasi untuk menciptakan produk dan layanan baru. Industri berperan sebagai pelaksana utama inovasi dan motor penggerak ekonomi. Sedangkan dari pihak masyarakat sipil, termasuk LSM, komunitas, dan individu, berperan dalam memberikan umpan balik, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah sosial, serta memastikan bahwa inovasi yang dihasilkan relevan dan bermanfaat bagi masyarakat luas (Carayannis dan Campbell, 2009).

1.6 Kerangka Berpikir

Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* di Kota Semarang

Identifikasi Masalah

Fakta yang didapatkan peneliti dari penelitian terdahulu, ditemukan bahwa peran *stakeholders* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* masih terdapat beberapa permasalahan :

1. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah dengan kelompok masyarakat dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*
2. Belum optimalnya kerjasama antara masyarakat dengan swasta dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*

Tujuan

Berlandaskan perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, ditentukan tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Menganalisis bentuk peranan yang dilakukan *stakeholders* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* di Kota Semarang.
2. Menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* di Kota Semarang.

Kondisi eksisiting pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* telah melibatkan peran berbagai *stakeholder*, namun masih ada beberapa *stakeholder* yang belum memaksimalkan perannya.

Quadruple Helix (Carayannis & Campbell, 2009) :

1. Pemerintah
2. Swasta
3. Akademisi
4. Masyarakat

Peran *Stakeholders* (Nugroho, 2014) :

1. *Policy Creator*
2. Koordinator
3. Fasilitator
4. Implementator
5. Akselerator

Keberhasilan Peran (Husnul Yakin, 2013) :

1. Partisipasi aktor
2. Perspektif aktor
3. Aksesibilitas aktor
4. Penentuan tindakan

KESIMPULAN & REKOMENDASI

1.7 Operasionalisasi Konsep

Pengelolaan hutan mangrove merupakan proses manajerial yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan hutan mangrove guna menyeimbangkan ekosistem pesisir. Pengelolaan ini membutuhkan partisipasi dari berbagai *stakeholder* untuk menciptakan mangrove yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi setiap *stakeholder* untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peran dan posisi masing-masing dalam kebijakan yang ada. Berikut adalah operasionalisasi dari analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* berdasarkan gejala yang diamati:

1. Policy Creator: *Stakeholder* yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan Mangrove Edupak Tambakrejo di Kota Semarang. Gejala yang diamati meliputi:
 - Wewenang dalam pembuatan kebijakan
 - Pembentukan kebijakan atau regulasi
2. Koordinator: *Stakeholder* yang berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*. Gejala yang diamati meliputi:
 - Koordinasi berbagai *stakeholder* yang terlibat
 - Memberikan petunjuk atau arahan dalam pelaksanaan pengelolaan
3. Implementor: *Stakeholder* yang secara langsung melaksanakan kegiatan pengelolaan untuk melestarikan mangrove secara berkelanjutan. Gejala yang diamati meliputi:

- Pelaksanaan pengelolaan *mangrove edupark*
 - Pengawasan pelaksanaan pengelolaan
 - Pengetahuan tentang pengelolaan *mangrove edupark*
4. Fasilitator: *Stakeholder* yang berperan dalam menyediakan kebutuhan untuk kegiatan pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*. Gejala yang diamati meliputi:
- Memfasilitasi kegiatan pengelolaan *mangrove edupark*
 - Penyediaan fasilitas yang diperlukan
5. Akselerator: *Stakeholder* yang berperan dalam mempercepat kegiatan pengelolaan mangrove berkelanjutan dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait. Gejala yang diamati meliputi:
- Percepatan program pengelolaan *mangrove edupark*
 - Penyumbangan gagasan atau inovasi dalam pelaksanaan kegiatan

Tabel 1.6 Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Sumber Data
1.	Peran <i>Stakeholders</i> dalam Pengelolaan <i>Mangrove Edupark Tambakrejo</i> . Mengacu pada teori peran (Nugroho, 2014) dan Identifikasi <i>stakeholders</i> dalam	1. Adanya <i>Stakeholder</i> yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan atau regulasi terkait pengelolaan Mangrove Edupark Tambakrejo di Kota Semarang.	Studi pustaka melalui buku dan jurnal, observasi, dan wawancara dengan <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam Pengelolaan <i>Mangrove</i>

	pengelolaan <i>Mangrove Edupark Tambakrejo</i>. Mengacu pada teori <i>quadruple helix</i> (Campbell & Carayannis, 2009)	2. Terdapat <i>Stakeholder</i> yang berperan dalam mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan <i>Mangrove Edupark Tambakrejo</i>. 3. <i>Stakeholder</i> yang secara langsung melaksanakan kegiatan pengelolaan untuk melestarikan mangrove secara berkelanjutan. 4. <i>Stakeholder</i> yang berperan dalam menyediakan kebutuhan untuk kegiatan pengelolaan <i>Mangrove Edupark Tambakrejo</i>. 5. <i>Stakeholder</i> yang berperan dalam mempercepat kegiatan pengelolaan mangrove berkelanjutan dengan melibatkan seluruh <i>stakeholder</i> terkait. 6. Adanya keterlibatan dari pihak pemerintah (<i>state</i>) dalam kegiatan pengelolaan.	<i>Edupark Tambakrejo</i>
--	--	---	----------------------------------

		7. Keterlibatan pihak swasta (<i>private</i>) dalam mendukung kegiatan pengelolaan. 8. Keikutsertaan pihak akademisi (<i>academic</i>) dalam mendukung kegiatan pengelolaan. 9. Partisipasi aktif dari masyarakat (<i>society</i>) setempat sebagai pihak yang paling dekat dengan ekosistem.	
2.	Analisis faktor pendorong dan penghambat peran <i>stakeholders</i> dalam pengelolaan <i>Mangrove Edupark Tambakrejo</i>. Mengacu pada empat unsur utama penentu keberhasilan peran (Husnul yakin, 2013) dalam (Widodo A.A., dkk., 2022)	1. Partisipasi aktor yang merujuk pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam implementasi kebijakan 2. Perspektif aktor yang mengacu pada cara aktor memahami dan menafsirkan suatu kebijakan. 3. Aksesibilitas aktor yang mencerminkan sejauh mana aktor memiliki kemudahan dalam memperoleh	Studi pustaka melalui buku dan jurnal, observasi, dan wawancara dengan <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam Pengelolaan <i>Mangrove Edupark Tambakrejo</i>

		informasi, sumber daya, dan fasilitas yang diperlukan dalam menjalankan kebijakan. 4. Penentuan tindakan yang berkaitan dengan bagaimana aktor mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan.	
--	--	--	--

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*. Metode kualitatif dipilih untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, gambar, dan perilaku yang dapat diamati, mencerminkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian kualitatif harus memiliki batasan dan fokus yang jelas terhadap masalah yang diangkat. Fokus ini dapat ditentukan melalui interaksi antara peneliti dan subjek penelitian, sehingga dapat menetapkan lokasi penelitian yang tepat. Pada penelitian ini, perhatian akan diberikan pada peran pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan

Mangrove Edupark Tambakrejo di Kota Semarang. Lokasi penelitian ini adalah di *Mangrove Edupark Tambakrejo*, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran dan tugas setiap pemangku kepentingan dalam pengelolaan mangrove edupark yang dilakukan di Desa Tambakrejo, Tanjung Mas.

1.8.3 Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif yang belum memiliki kejelasan terkait objek penelitian, sumber data, dan hasil yang diharapkan membutuhkan proses pengumpulan data, analisis, dan penyusunan kesimpulan melalui kegiatan lapangan di lokasi penelitian (Sugiyono, 2007: 222-224). Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang didukung oleh berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk melaksanakan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa alat penelitian, yaitu:

1. Buku catatan, yang berfungsi untuk mencatat hasil wawancara dari narasumber sebagai dokumentasi penting.
2. Alat rekam suara atau video recorder, yang digunakan untuk merekam seluruh percakapan dengan informan. Ponsel juga dapat digunakan untuk merekam suara atau video guna memastikan data terkumpul dengan lengkap dan jelas.
3. Kamera, yang digunakan untuk mengambil foto saat wawancara dengan narasumber. Foto-foto ini dapat digunakan sebagai bukti dan meningkatkan validitas penelitian.

1.8.4 Subyek Penelitian

Subjek penelitian mencakup individu atau kelompok yang bertindak sebagai informan atau sumber informasi untuk peneliti mengenai fenomena yang akan diteliti. Informan ini diharapkan memiliki pengetahuan mendalam tentang situasi dan kondisi yang relevan dengan latar belakang penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball sampling, yaitu proses di mana satu informan merekomendasikan informan lainnya yang dianggap memiliki pengetahuan terbaik mengenai informasi yang dibutuhkan.

Peneliti mencari informan yang benar-benar memahami aktivitas pengelolaan hutan mangrove serta fenomena-fenomena yang terkait sesuai dengan peran mereka. Subjek penelitian dalam analisis peran *stakeholder* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* di Kota Semarang meliputi:

- a) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah,
- b) Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang,
- c) Dinas Perikanan Kota Semarang,
- d) Kelurahan Tanjung Mas,
- e) PT Pertamina (Persero) Integrated Terminal Semarang,
- f) Tim Pengabdian FMIPA Unnes,
- g) Kelompok Peduli Lingkungan CAMAR,
- h) Masyarakat Tambakrejo.

1.8.5 Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984: 47) yang dikutip oleh Moleong (2007: 157-163), dalam penelitian kualitatif, sumber data utama terdiri dari kata-kata dan tindakan, sementara data tambahan mencakup dokumen, foto, dan lainnya.

a. Lisan dan Tindakan

Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara, observasi, atau kombinasi keduanya, tergantung pada situasi dan kondisi. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti telah dirancang sedemikian rupa agar semua pertanyaan dapat dijawab oleh informan, namun tetap memberikan kebebasan bagi informan untuk memberikan penjelasan di luar pertanyaan yang diajukan.

b. Sumber Tertulis

Sumber tertulis menjadi tambahan dalam penelitian yang mencakup buku dan jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dengan demikian, peneliti dapat memperoleh informasi yang relevan tentang subjek yang sedang diteliti.

c. Foto

Foto memberikan data deskriptif yang berharga dan mendukung validitas data. Sumber foto dapat menggambarkan kondisi nyata tentang subjek yang diteliti dengan memberikan keterangan pada setiap foto. Dalam penelitian ini, peneliti melampirkan beberapa foto yang menunjukkan kondisi fisik sarana prasarana dan situasi di *Mangrove Edupark Tambakrejo*.

1.8.6 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori utama:

- a) Data Primer: Data ini dikumpulkan dan diolah langsung dari sumber aslinya. Data primer diperoleh melalui metode seperti observasi dan wawancara dengan informan yang kemudian dicatat dan direkam oleh peneliti.
- b) Data Sekunder: Data ini merupakan data yang telah ada dalam bentuk jadi, sehingga peneliti tidak perlu melakukan pengumpulan atau pengolahan ulang. Biasanya, data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan yang berasal dari buku, dokumen, atau sumber data dari internet yang telah diolah oleh penulis aslinya. Data sekunder ini siap digunakan dan memudahkan peneliti dalam mendapatkan informasi yang diperlukan.

Dalam penelitian mengenai analisis peran *stakeholders* dalam pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* di Kota Semarang, peneliti menggunakan kedua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder, untuk melengkapi dan memperkaya hasil penelitian.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga metode berikut:

- a) Observasi: Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai temuan di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena di *Mangrove Edupark Tambakrejo* untuk memperoleh data yang akurat.

- b) Wawancara: Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan mendalam mengenai isu-isu yang relevan dengan penelitian. Pertanyaan wawancara disusun oleh peneliti dan berkaitan dengan kebijakan serta aktivitas pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo* di Kota Semarang. Wawancara ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan atau peran dalam pengelolaan tersebut.
- c) Dokumentasi: Metode ini melibatkan pengumpulan data sekunder dari dokumen-dokumen yang sudah ada dan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan *Mangrove Edupark Tambakrejo*. Dokumen-dokumen tersebut meliputi peta lokasi mangrove, dokumentasi kegiatan penanaman, kondisi hutan mangrove, serta regulasi yang berlaku.

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- a) Kondensasi Data: Huberman dan Saldana (2014) dalam Teuku Afrizal, Kismartini & H. Warsono (2024) mengusulkan istilah kondensasi data sebagai pengganti istilah reduksi data dalam konteks analisis data kualitatif. Perubahan terminologi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang proses tersebut. Istilah "reduksi" dapat terkesan mengurangi atau menghilangkan data, sementara "kondensasi" mencerminkan upaya untuk menyaring, meringkas, dan menyusun data tanpa kehilangan esensinya, sehingga tetap mempertahankan kekayaan informasi yang relevan untuk analisis. Kondensasi data mencakup aktivitas seperti memilih, menyederhanakan, menyusun, dan mentransformasi data

mentah ke dalam bentuk yang lebih bermakna dan dapat diinterpretasikan. Data yang dikurangi nantinya merupakan hasil data dari wawancara terhadap narasumber penelitian yang tidak ada kaitannya dengan tema dari penelitian ini atau kurang tepat apabila dimasukkan sebagai hasil analisis, selanjutnya isi dari dokumentasi berbagai instansi yang tentunya berkaitan secara lebih luas pada bagian penting yang berfokus pada penelitian, dan diambil pula dari sumber lainnya yang berupa jurnal dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Dalam melakukan kondensasi data, akan dilakukan secara terus-menerus dan langsung.

- b) Penyajian Data: Langkah ini penting dalam analisis kualitatif di mana informasi disusun sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk tabel, gambar, diagram, atau narasi. Penyajian data membantu dalam memahami data dengan lebih baik dan melihat pola atau hubungan antar data.
- c) Verifikasi Data: Tahap ini melibatkan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti membuat kesimpulan sementara yang fleksibel dan terbuka, yang kemudian diperinci dan diperkuat seiring berjalannya waktu. Data diuji untuk memastikan validitas dan akurasi sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti.

Selain itu, interpretasi data dalam penelitian ini melibatkan upaya memahami makna dan konteks penelitian serta penerapan teori yang relevan. Proses ini membantu peneliti menemukan pola umum, perbedaan, atau kesamaan dalam data,

serta menyusun argumen yang didukung oleh data yang ada, yang pada akhirnya membantu dalam penyusunan kesimpulan.

1.8.9 Kualitas Data

Triangulasi dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memastikan validitas data yang diperoleh dari berbagai metode seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber data digunakan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari subjek atau metode yang berbeda untuk mengidentifikasi kesamaan atau perbedaannya. Tujuannya adalah untuk menilai kredibilitas data melalui perbandingan tersebut. Peneliti mencari berbagai sumber untuk melihat fenomena dari sudut pandang yang berbeda guna memverifikasi keabsahan data yang dikumpulkan.